

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the role and governance of the local government in addressing illegal gold mining activities (PETI) in Limun Subdistrict, Sarolangun Regency. Specifically, the study focuses on two main objectives: first, to examine the strategies and efforts implemented by the local government, particularly the Environmental Agency, in controlling and mitigating the environmental damage caused by PETI; and second, to identify and analyze the internal and external factors that hinder the effectiveness of these efforts. The significance of the study lies in its potential to contribute to the development of more effective and collaborative environmental policies that align with sustainable development goals.

The study employs a qualitative descriptive research method to gain a deep and comprehensive understanding of the phenomenon. Data were collected through multiple techniques, including in-depth interviews with selected informants using purposive sampling, direct observation in the field, and document analysis. Primary data were obtained from government officials, law enforcement representatives, and local residents affected by PETI activities, while secondary data were gathered from books, academic journals, policy documents, and online sources. The data were analyzed through qualitative content analysis to identify recurring themes and patterns.

The results reveal that although there have been various initiatives taken by the local government and relevant agencies, the overall governance remains suboptimal. Key issues include poor coordination among institutions, lack of commitment from law enforcement during outreach programs, and limited authority at the subdistrict level to take direct action. Additionally, the absence of integrated and up-to-date data has hindered the planning and execution of law enforcement strategies. The mobile and covert nature of PETI operations also makes monitoring and intervention efforts more difficult. Economically, many local residents still rely on illegal mining as their primary livelihood, creating resistance to change. Socialization programs and community engagement have yet to yield significant behavioral changes, partly due to insufficient follow-up and lack of viable alternative economic opportunities.

Keywords: Local Governance, Illegal Gold Mining (PETI), Environmental Management, Limun Subdistrict.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran serta tata kelola pemerintah daerah dalam menangani aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada dua tujuan utama: pertama, untuk mengkaji strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam mengendalikan dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat PETI; dan kedua, untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas upaya tersebut. Signifikansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan kolaboratif serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk wawancara mendalam dengan informan terpilih menggunakan teknik purposive sampling, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen. Data primer diperoleh dari pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan warga setempat yang terdampak oleh aktivitas PETI. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan sumber daring. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang berulang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, tata kelola secara keseluruhan masih belum optimal. Masalah utama meliputi koordinasi yang lemah antar lembaga, kurangnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam program penyuluhan, serta keterbatasan kewenangan di tingkat kecamatan untuk mengambil tindakan langsung. Selain itu, ketiadaan data yang terintegrasi dan mutakhir menghambat perencanaan dan pelaksanaan strategi penegakan hukum. Sifat operasi PETI yang bergerak dan tertutup juga menyulitkan upaya pemantauan dan intervensi. Secara ekonomi, banyak warga setempat yang masih bergantung pada penambangan ilegal sebagai sumber penghidupan utama, sehingga menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Program sosialisasi dan pelibatan masyarakat belum menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, sebagian disebabkan oleh kurangnya tindak lanjut dan terbatasnya alternatif mata pencaharian yang layak.

Kata kunci: Tata Kelola Daerah, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Pengelolaan Lingkungan, Kecamatan Limun.